

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemikiran Politik

1. Pengertian Politik

Data politik berasal dari kata polis yang dalam terminology orang Yunani berarti negara kota. Aristoteles (384-322 SM) merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang “manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik”. Dengan itu ia menjelaskan, hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik, dan pada hakikatnya interaksi antara dua orang atau lebih juga bisa dipastikan akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat ini merupakan kecenderungan alami manusia, hanya sedikit atau bahkan tidak ada orang yang tidak menjalin kerjasama dengan orang lain.¹

Manakala manusia mencoba untuk menentukan posisinya di masyarakat, manakala manusia berusaha meraih kesejahteraan

¹ Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (serang: LP2M, 2015), h. 2

pribadinya melalui sumber yang tersedia, dan manakala orang yang sedang mempengaruhi orang lain untuk menerima pandangannya, maka mereka akan melihat dirinya sibuk dengan kegiatan politik.²

Antara abad keenam belas sampai awal abad ke dua puluh, politik diartikan secara lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang dipahami orang-orang Yunani. Jean Bodin (1530-1596), seorang filosofis Perancis memperkenalkan istilah ilmu politik. Tetapi karena ia seorang pengacara, sorotannya mengenai ciri-ciri negara menyebabkan ilmu politik terkait dengan lembaga-lembaga formal kenegaraan.³

pemikiran politik selepas wafatnya Nabi Muhammad semakin berkembang, hal ini terbukti dengan terbentuknya lembaga-lembaga pada masa pemerintahan Khulafaurrosidin, pemikiran-pemikiran politik mereka melalui pidato mereka selepas di bai'at, peraturan-peraturan yang mereka buat untuk

² Suryanto, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 1

³ Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu, ..., h.4*

para pejabat negara dan sistem pemerintahan yang semakin berkembang.⁴

Sedangkan, Sebuah pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang mengikuti dan menerima otoritas absolute Islam. Ia berupaya membentuk sebuah tertib sosial yang Islami sesuai dengan ajaran yang dikandung Islam, pelaksanaan syariat, sembari terus menerus berupaya untuk mengarahkan keputusan-keputusan politik dan fungsi-fungsi public sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam.

Munawir Sjadzali, berdasarkan hasil penelitiannya, menginformasikan, bahwa di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan dengan segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para pemikiran aliran ini pada

⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 162

umumnya berpendirian, bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, yang didalam nya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan dan politik. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat khalifah al-Rasyidin sebagaimana telah disebutkan di atas. Tokotoko utama dari aliran ini antara lain Syaikh Hasan Al-Bana, Sayyid Quthb, Syaikh Muhammad Rasyid dan yang paling vocal adalah Maulana A.A.Maududi.

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali pada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur; dan nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokotoko terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abd Al-Razik dan Thaha Husain.⁵

⁵ Abudin Nata, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 322

Untuk membenarkan pendapatnya ini, Abd Al-Razik merujuk pada beberapa ayat suci Al-Quran. Dia percaya bahwa menurut ayat-ayat suci tersebut, Nabi Muhammad SAW hanya seorang rosul yang diberi amanah untuk menyampaikannya wahyu Allah kepada rakyat dan tidak lebih dari itu.

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

{ ١٠٥ }

Dan kami turunkan (Al-Quran) itu dengan sebenarnya dan (Al-Quran) itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau (Muhammad), hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. (Qs. Al-Isro:105).⁶

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا { ٥٦ }

Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. (Qs. Al-Furqon: 56).⁷

وَأَنْ أُنزِلَ الْفُرْقَانُ ۗ فَمَنْ أِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ

ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ { ٩٢ }

⁶ Muhammad Shohib Tohir, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung, Mikhraj Khazanah,2013), hlm. 293

⁷ Muhammad Shohib Tohir, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ...,hlm. 365

Dan agar aku membacakan Al-Quran (kepada manusia). Maka barang siapa mendapat petunjuk maka dia mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barang siapa sesaat, maka katakanlah, "sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan." (QS. An-Naml: 92).⁸

Abdul Al-Razik berargumen, jika Nabi Muhammad SAW. Memiliki peran-peran lain, semisal menjadi seorang pemimpin politik, maka tentunya Al-Quran akan mengumumkannya. Untuk menjustifikasi pendapatnya, dia berargumen bahwa setiap negara membutuhkan suatu struktur politik yang memuat institusi-institusi dan administrasi tertentu, tetapi kepemimpinan Muhammad tidak memiliki unsur-unsur yang penting semacam itu.

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem kenegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan maha penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat sistem

⁸ Muhammad Shohib Tohir, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., hlm. 385

ketatanegaraan, akan tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini yang paling menonjol antara lain, Muhammad Husain Haikal, penulis buku yang terkenal *Hayatul Muhammad*.⁹

Dari ketiga aliran di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam adalah suatu bagian penting dalam aspek kebudayaan umat muslim, dan bahwa syariat membutuhkan kekuasaan politik dan otoritas agar bisa di implementasikan, akan menghantarakan kita kepada kesimpulan bahwa semua sistem politik dalam dunia Islam secara historis merupakan pemerintahan religius.

pemikiran politik selepas wafatnya Nabi Muhammad semakin berkembang, hal ini terbukti dengan terbentuknya lembaga-lembaga pada masa pemerintahan Khulafaurrosidin, pemikiran-pemikiran politik mereka melalui pidato mereka selepas di bai'at, peraturan-peraturan yang mereka buat untuk para pejabat negara dan sistem pemerintahan yang semakin berkembang.

⁹ Abudin Nata, *Metodologi Study Islam,*, h. 323

B. Pengertian Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Untuk menambah serta mempertegas pengertian diatas, dibawah ini disampaikan beberapa definisi mengenai partai politik:

- a. Giovanni Sartori mengartikan partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik
- b. R.H. Soltau (1961: 199) mengartikan partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilih

dan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

- c. Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut: partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang bersaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹⁰

dari keseluruhan penjabaran diatas dapat kita rumuskan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasikan dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum. Yang dimana partai politik menjadi prantara yang menghubungkan aspirasi-aspirasi yang beredar dimasyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan.

¹⁰ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017), h. 404

2. Peran dan Fungsi Partai Politik

Menurut UU No.2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 11 ayat 1, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara;
- b. Pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;¹¹

Dalam dunia literatur dikenal fungsi partai politik, yaitu sebagai berikut:

¹¹ Pembaharuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Bandung: Citra Umbera, 2011) h. 29

a. Sarana Komunikasi Politik

Salah satu tugas partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Partai politik berfungsi sebagai komunikasi politik, artinya partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang diperintah, yaitu menampung informasi dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak penguasa dan sebaliknya informasi yang berasal dari penguasa kepada masyarakat.

Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan aspirasi diatur dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintahan yang berupa rencana, prpgram atau kebijakan-kebijakan pemerintah disebar luaskan oleh partai politik kepada masyarakat.

b. Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam wacana ilmu politik bahwa yang diartikan dengan sosialisasi politik adalah suatu proses yang melaluinya seorang yang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Di samping menanamkan ideologi partai kepada para pendukungnya, partai politik pula harus menyampaikan atau mengajarkan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik harus mendidik masyarakat agar mempunyai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Proses penyampaian ini disebut sosialisasi politik.

Pada umumnya, proses sosialisasi politik ditempuh dengan cara menyelenggarakan kursus, penataran, atau ceramah tentang politik.

Di negara-negara yang sedang berkembang fungsi utama sosialisasi politik biasanya lebih banyak ditunjukkan pada usaha untuk memupuk integrasi nasional yang pada

umumnya bangsa yang sedang membangun itu masih bersifat heterogen.

c. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitmen). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik.

Rekrutmen politik merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan jadi calon-calon pemimpin. Salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik adalah menarik golongan generasi muda untuk dididik menjadi kader partai yang dipersiapkan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Dengan demikian, proses generasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih tajam.

d. Partai Politik Sebagai Sarana Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksudkan antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

Dalam analisis politik modern, bahwa partisipasi politik itu merupakan suatu masalah yang penting dan pada akhir-akhir ini banyak dipelajari dalam kaitannya dengan perkembangan dan perubahan politik dinegara-negara berkembang.

e. Partai Politik Sebagai Sarana Konflik

Potensi konflik ada dalam setiap masyarakat, apa lagi pada masyarakat itu penuh diwarnai oleh sifat

heterogenitas. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaingan merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan itu sering timbul konflik-konflik atau pertentangan antara mereka. Dalam hubungan ini, partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik.

Oleh karna itu, konflik harus bisa dikendalikan atau dijinkan agar tidak berlarut-larut yang bisa menggoyahkan dan membahayakan ekistensi bangsa. Dalam hal ini, partai politik dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin.¹²

3. Klasifikasi Partai Politik

Suryanto (2018) dalam Mariam Budiardjo (1977: 166-167) dalam bukunya *dasar-dasar ilmu politik*, partai politik dapat diklarifikasikan menjadi sebagai berikut.

¹² Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 189-191

a. Berdasarkan Segi Komposisi dan Fungsi Keanggotaanya

Partai Masa, dimana paeratai ini mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Partai ini terdiri atas pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan partai masa yaitu setiap aliran atau kelompok yang bernaung dibawahnya cenderung untuk melaksanakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat krisis yang pada akibatnya persatuan partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehigga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan paertai baru. Ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukungnya yang banyak.

Partai kader, mementingkan ketaatan organisasi dan disiplin kerja dari anggotanya. Pemimpinan partai menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut, dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai

yang telah ditetapkan. Ciri utama dan dipentingkan adalah disiplin dan ketaatan organisasi sehingga partai kader tidak mementingkan jumlah anggota yang banyak.

b. Berdasarkan Segi Sifat dan Orientasinya

Partai perlindungan adalah partai yang aktif pada saat dilangsungkannya pemilihan umum. Tujuannya adalah memenangkan pemilihan umum, dengan maksud untuk mendudukkan anggota-anggotanya pada jabatan-jabatan politik ataupun pemerintahan sesuai dengan target atau programnya. Oleh karena itu, pada umumnya partai perlindungan kurang mempunyai disiplin yang ketat dalam keanggotaannya.

Partai perlindungan, umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasinya di tingkat lokal sering cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utama ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkan.

Oleh karena itu, kegiatan-kegiatannya hanya menjelang pada masa-masa pemilihan umum.

Partai ideologi atau partai asas, biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan. Partai ideologi pada umumnya memiliki disiplin yang ketat dalam keanggotaannya.

c. Menurut sifatnya

Partai Politik Ekstrim, Suatu partai politik dikatakan bersifat ekstrem apabila partai politik itu menganut ajaran sebagai asasnya, dan para pengikutnya secara apriori tidak dapat bekerja sama atau tidak adanya saling pengertian dengan partai politik lainnya dalam suatu wilayah negara yang sama.

Partai Politik Lunak, suatu partai politik dikatakan lunak apabila partai politik yang bersangkutan

berdasarkan ajaran atau asas dapat membina kerjasama, saling toleransi dengan partai politik lainnya dalam wilayah suatu negara yang sama.

Partai Politik Moderat, suatu partai politik dikatakan bersifat moderat apabila politik itu berdasarkan ajaran yang dijadikan asasnya para pengikutnya “secara loyal” dapat bekerja sama dengan partai politik lain yang hidup dan berkembang dalam suatu wilayah negara yang sama. Kenyataanya, pembedaan tersebut hanya bersifat gradasi karena pada dasarnya yang mewarnai suatu partai politik adalah para pelaku politik (Pndoyo, 1981: 19-21).¹³

C. Dasar Hukum Partai Politik

Maklumat pemerintahan 3 desember 1945itu menyebutkan bahwa atas dasar usul badan pekerja (PB) Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) kepada pemerintah agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat (rakyat) untuk mendirikan partai-partai politik. Dalam dictum maklumat

¹³ Suryanto, Pengantar Ilmu Politik,.....h. 223

pemerintah 3 november 1945 itu yang ditanda tangani oleh presiden Muhammad Hatta berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemerintahan menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin kejalan yang benar segala aliran dan paham yang ada dimasyarakat.
- b. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelumnya diselenggarakan pemilihan umum bagi anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat pada januari 1946.¹⁴

Lima UU pembangunan politik yang disahkan presiden dengan persetujuan DPR pada tahun 1985 ialah:

- a. UU No. 1 Tahun 1985 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Pimpinan Rakyat sebagaimana diubah dengan UU No. 4 tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1980.
- b. UU No. 2 tahun 1985 tentang perubahan UU No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan

¹⁴ Anthonius sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 188

DPD sebagaimana diubah dengan UU No. 5 tahun 1975.

- c. UU No. 3 tahun 1985 Perubahan UU No. 3 tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- d. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
- e. UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Secara keseluruhan lima UU Bidang Pembangunan Politik itu merupakan pelaksanaan dari amanat rakyat Indonesia yang dituangkan kedalam:

- a. Ketetapan MPR No. 1/MPR/1983 tentang peraturan tata tertib MPR (dasar hukum UU No. 5 Tahun 1985)

Pasal 104: MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap nya serta akan melaksanakan nya mueni dan konsekuen.

Pasal 105 Ayat 1: apabila ada kehendak Anggota MPR untuk mengajukan usul perubahan UUD 1945, maka usul tersbut harus di ajukan oleh sekurang-kurang nya 4 Fraksi seutuh nya dengan daftar nama dan tandatangan seluruh anggota nya.

Pasal 106: Apa bila kehendak untuk mengusulkan perubahan UUD 1945 sebagai mana di maksud pasal 105 disetujui oleh MPR, maka MPR menugaskan pereside mendarais untuk melaksanakan Referendum sesuai dengan Undang-undang nya.

b. Ketetapan MPR No.11/MPR/1983 Tentang GBHN:

Demi kelestarian dan pengalaman pancasila, peartai politik dan golongan karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politok yang hanya berasaskan pancasila, sebagai satu-satunya asas (dasar hukum UU No. 3 tahun 1985 dan UU No.8 tahun 1985).¹⁵

Secara konstektual erareformasi adalah era kehidupan ketatanegaraan dan politik sesudah berakhirnya era orde baru pada tanggal 21 mei 1998 dengan ditandai lengsernya soeharto dari kursi keperesidenan RI dan digantikan oleh BJ Habibie. Dalam era reformasi sampai tahun 2013 sudah di berlakukan Unadang-undang yang mengatur tentang partai politik, yakni UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik kemudian Undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang partai politik. Perubahan UUD

¹⁵ C. st Kansil, Haluan Politik Negara Indonesia, (Jakarta: Erlangga), h. 209-210

1945 Sebanyak 4 kali (1999-2002) telah mengubah secara signifikan dan fundamental sistem ketatanegaraan Indonesia untuk melakukan perubahan tiga Undang-undang yakni UU partai politik, UU pemilu dan UU susduk.¹⁶

Diperaturan undang-undang tentang partai politik telah terjadi beberapa kali perubahan antara lain:

1. Undang-undang No. 7 tahun 1959 Tentang Syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian.
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1960 Tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai Politik.
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
5. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.
6. Undang-undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
7. Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹⁶ Mariam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 449-451

8. Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.¹⁷

D. Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik disebut pula sebagai *political forming* atau *politische Bildung*. Disebut “Forming” karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status atau kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “Bildung” (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh dengan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik (kartono, 1996: 63).¹⁸

Giesecke (ahli didaktik, pendidik dan politikus Jerman), mendefinisikan pendidikan politik sebagai (a) Pendidikan politik adalah bildungwissen, yakni bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*mensbeeld*)

¹⁷ Wikipedia, *Sejarah Partai Politik di Indonesia 2011*, (<https://id.m.wikipedia.org>)

¹⁸ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung, Mandar Maju, 1996) h. 63

serta pengembangannya dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri, sehingga; orang menjadi sadar akan kekuatan pribadi dan kemampuan bangsa sendiri, sadar akan identitas bangsa sendiri, memiliki rasa percaya diri yang kuat, sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta dependensi pada kekuatan atau bangsa lain, memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup (dalam hal ini Pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk mencapai sasaran hidup berbangsa yakni hidup sejahtera. (b) Pendidikan politik dalam arti *orientierungswissen*, yaitu mampu berorientasi pada paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan dan umat manusia. Secara objektif orang harus berani melihat realitas nyata dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi-situasi kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan noda dan unsur deskriptif lainnya, sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang lebih baik, dan orang bisa keluar dari macammacam jalan buntu menuju pada keseimbangan dan keserasian hidup bersama. (c) Pendidikan

politik dalam arti *verhaltensweisen* adalah memahami hukum, tata tertib, dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik, sehingga subjek menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi dan kondisi politik sesaat. (d) Pendidikan politik dalam arti *aktionwissen* adalah mampu bertingkah laku tepat, cermat dan benar, sebab didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, disertai refleksi objektif, wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pemawasan reflektif, serta membuahkan ide-ide dan aksi/tindakan yang tepat mantap untuk mengatasi semua kesulitan (eko & puji, 2017: 10)¹⁹

R. Hayer mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Pendidikan politik merupakan upaya edukatif yang intensional, disengaja dan

¹⁹ Eko Handoyo & Puji Lestari, *Pendidikan Politik*. (Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2017) h. 10

sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi perilaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Pendidikan politik juga merupakan pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.²⁰

S. Lewat pendidikan politik orang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis, disamping usaha demokratis dari struktur kemasyarakatannya.

Menurut Alfian dalam mendefinisikan pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dua tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik

²⁰ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*,...,h. 64

yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.²¹

Dari definisi di atas, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa yang terorganisir dan dilakukan secara sengaja dan sistematis, untuk memberi pengetahuan pada warga negara agar memiliki pengetahuan politik sehingga menjadikan warga negara memiliki kesadaran serta kepribadian politik, yang pada akhirnya diharapkan dapat melakukan kritik serta koreksi pada pemerintah.

2. Pendidikan Politik Dalam Bahasa Edukatif

- a. Pendidikan politik adalah upaya belajar dan latihan mensistematikan aktivitas sosial, dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia disuatu wilayah negara. Kebijakan ini antara lain berupa pengembangan sportivitas, bertingkah laku baik, jujur, silidaritas dan toleran terhadap bangsa sendiri. Bersikap kooperatif dan praktis, mampu bekerjasama dalam

²¹ Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989)

kelompok, jujur, dan lain-lain. Perilaku penuh kebijakan ini merupakan syarat teknis dalam tingkah laku politik demi pencapaian kebaikan, kerukunan, dan kesejahteraan bangsa.

- b. Pendidikan politik itu adalah identif dengan pembentukan hati nurani politik, yang didalamnya secara implisit mencakup rasa tanggung jawab ethis terhadap sesama warganegara.

Dalam iklim demokrasi, rakyat diberi kesempatan untuk memilih sendiri alternative yang menguntungkan bagi dirinya untuk memnuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Oleh karna itu dia diajar untuk bersikap jujur dan berani serta sanggup mempertanggung jawabkan kejadian-kejadian yang terjadi dinegaranya, di samping ikut menentukan norma-norma yang sepatutnya jadi panutan umum. Jadi dia tidak boleh bersikap pasif, apatis, naif dan sinis secara politik, dan Cuma mampu mengkhayalkan idylle demokrasi belaka. Dengan mendapatkan pendidikan politik, masa rakyat diharapkan

bisa menjadi kreatif, kritis, mandiri otonom, mantap dan partisipatif bila kepadanya diberikan kesempatan untuk berperilaku demokratis.

- c. Pendidikan politik menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai peristiwa-peristiwa politik dengan segala jaringan-jaringannya.

Skeptisisme harus diartikan sebagai skeptisisme ilmiah, untuk menghindari sikap tidak kritis, muda percaya, dan meyakini kebenaran mitos-mitos, politik hingga orang mampu menjalankan kontrol politik, pengecekan dan verifikasi.

Fakta politik dengan segenap kaitannya itu bukan merupakan kepastian permanen, menetap dan massif tidak berubah akan tetapi berupa gejala memproses atau menjadi yang dinamis, bisa berubah dan diubah dengan sengaja untuk dibetulkan dan disempurnakan demi kepentingan bangsa dan negara. Pribadi yang mempunyai dasar pendidikan politik yang kuat akan selalu berkepentingan dengan:

- 1) . Ketidak mantapan (dinamisme) dan perubahan dari struktur-struktur serta urusan-urusan lokal, regional,rasional.
 - 2) Cenderung mengadakan perbaikan, kemajuan atau proses dan aktivitas menyempurnakan kelembagaan politik.
- d. Pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan terhadap jaringan-jaringan dan kemasyarakatan.

Politik dan negara itu bukan hanya masalah formula teoritis, fiksi yuridis, atau urusan abstrak dan idealistic, akan tetapi betul-betul merupakan kenyataan telanjang dan fakta keras-kejam, penuh unsur kontroversial atau kontradiktif dan konflik-konflik tajam.

- e. Pendidikan politik banyak membahas konflik-konflik actual.

Lewat pendidikan politik akan diperoleh kemampuan rakyat untuk menganalisis bermacam-macam konflik, serta ikut memecahkan dengan cara rakyat itu sendiri,

bukan dengan cara-cara yang ditekankan dari atas. Dengan demikian orang menyadari hak dan kewajibannya sebaga warganegara yang baik untuk ikut mengatur masyarakat sekitar, negara dan pemerintah. Juga ikut mengontrol gerak pembangunan tanpa perlu terjadi konflik-konflik yang membahayakan.²²

3. Tujuan Pendidikan Politik

Partai politik bertujuan untukmembentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar menjadi partisipasi politik yang positif.

a. Kepribadian politik

Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada individu untuk menghadapi dunia politik. Kepribadian politik merupakan tujuan pokok dari proses pendidikan politik. Karena itu, tidak ada kesadaran politik tanpa kandungan kepribadian politik, dan bahwa tingkat

²² Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa,....*,h. 79-80

partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang membentuk kandungan kepribadian politik.

Kepribadian politik merupakan respon yang dinamis sistematis dan berkesinambungan. biasanya muncul karena adanya rangsangan politik. Karna itu, meliputi sejumlah motivasi yang mungkin diuraikan menjadi sekumpulan nilai dan kebutuhan, pengetahuan, dan kecendrungan perilaku.

b. Kesadaran politik

Petter mendefinisikannya dengan “berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik.

Paulo Freyri. Ia berpendapat bahwa kesadaran adalah pengetahuan yang kritis, pandangan yang benar terhadap realitas, dan pemahaman yang baik terhadap dunia dimana manusia itu hidup, kemudian berusaha mengubahnya. Kesadaran adalah instrument kritis yang

digunakan oleh orang-orang tertindas untuk menyingkap hakikat diri dan mereka yang menindasnya.

Kesadaran politik ini dapat dicapai melalui satu atau lebih cara, diantaranya:

Arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun nonformal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan, dan pengajaran politik langsung, yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin-pemimpin politik, pengalaman politik yang didapatkan melalui partisipasi politik dan kesadaran yang lahir melalui dialog-dialog kritis.

Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran politik yang paling terpenting diantaranya: Jenis kultur politik dimana individu itu tumbuh darinya, atau dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya, wawasan politik partisipatif menyebabkan orientasi warga terhadap politik yang bersifat aktif, banyak berbagai revolusi dan perubahan budaya yang terjadi di masyarakat. Revolusi ini dapat melahirkan

berbagai nilai, konsepsi, dan wawasan baru, yang mempengaruhi kesadaran politik individu dalam masyarakat dan berbagai kemampuan, kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya. Individu yang lebih banyak mengenyam pendidikan akan lebih luas wawasan dan pengetahuan politiknya, sehingga akan membentuk kesadaran politiknya.

c. Partisipasi politik

Mayron Weiner, yang mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela yang bertujuan memberikan pengaruh agar memilih strategi umum, atau memilih pemimpin-pemimpin politik tingkat regional maupun nasional.

Dr. Kamal Al-Manufi mendefinisikan dengan “hasrat individu untuk berperan aktif dalam kehidupan politik melalui pengelolaan hak bersuara dan pencalonan untuk lembaga-lembaga yang dipilih, mendiskusikan persoalan-persoalan politik dengan orang lain, atau bergabung dengan organisasi-organisasi mediator.

Partisipasi politik merupakan media fundamental untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat. Partisipasi politik akan menyadarkan para partisipan akan hak dan kewajiban mereka, serta memperluas kordinator kesadaran politik melalui berbagai pengalaman dan wawasan politik yang lahir darinya.²³

4. Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik

Partai-partai politik khususnya di negara-negara berkembang memainkan peran penting daam menciptakan dan mengubah kultrul politik. Berdirinya partai-partai dalam suatu masyarakat merupakan media pendidikan politik yang sesungguhnya.

Partai politik sampai batas tertentu memainkan perannya dalam pendidikan politik melalui: *pertama*, pengajaran politik yang benar. Hal ini dilakukan dengan mengadakan berbagai pertemuan, muktamar, resepsi, progam pelatihan politik, pengajaran sejarah nasional, serta publikasi program dan

²³ Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*,(Karangasem Solo: Era Intermedia, 2000) h. 94-95

pandangan-pandangan politik diberbagai jurnal dan buletinnya. Partai termasuk lembaga pendidikan yang memberikan berbagai informasi politik, ekonomi dan sosial kepada rakyat dengan cara sederhana, namun membangkitkan kesadaran politik mereka. Disamping itu, partai bekerja untuk memobilisasi rakyat dibelakang berbagai pandangan politik, tujuan, dan program tertentu, melalui penyadaran politik. Partai merupakan alat untuk menciptakan perubahan orientasi politik dan perilaku masyarakat.

Kedua, pemberian kesempatan untuk partisipasi politik secara teratur dan dalam bentuk yang lebih kontinu. Huntington menegaskan bahwa sarana institusional yang utama untuk mengatur keluasan partisipasi politik adalah partai politikia dapat memeberi bingkai yang lebih penting dan serasi untuk mewujudkan partisipasi politik. Partisipasi ini akan menyebabkan semakin kokohnya nilai-nilai yang sudah ada, atau bisa juga menyebabkan tertanamnya nilai-nilai baru. Munculnya partai-partai juga menumbuhkan keinginan anggota masyarakat untuk melakukan praktik

politik dan partisipasi di dalamnya, jika mereka memiliki harapan atau optimism bahwa partisipasi tersebut tergantung kepada kemampuan dan kecakapan mereka.

Ketiga, kehidupan partai termasuk media penyiapan dan pelatihan bagi individu untuk berani mengambil keputusan dan berfikir independen mengenai berbagai masalah umum, serta kemampuan untuk bersikap kritis dan menentukan pilihan, yang merupakan kemampuan-kemampuan dasar bagi sebuah partisipasi yang matang. Syafiq Garbal menegaskan bahwa pengembangan kemampuan memutuskan dan memilih pada diri warga negara akan terjadi melalui koordinasi kelompok-kelompok politik maupun nonpolitik, seperti berbagai asosiasi mislanya, dan dengan berbungannya individu kedalamnya. Dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, individu akan berlatih untuk beraktivitas politik, menguatkan pengaruhnya, meminimalisir dominasi atasnya dan secara efektif akan membentuk tokoh-tokoh politik. Akan tetapi berbagai kemampuan tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya

kebebasan politik dalam masyarakat dan dalam partai-partai itu sendiri. Pendidikan politik dengan makna seperti itu tidak mungkin akan terwujud, sedangkan kebebasan berpendapat tidak terjamin. Pendidikan ini tidak akan tercapai di dalam partai jika kativitas politik di dalamnya telah berubah menjadi ajang saling hasut untuk membangkitkan emosi dan membakar hubungan pribadi serta untuk mengkokoh kekuasaan diktator di sisi lain.²⁴

²⁴ Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*,...h. 109